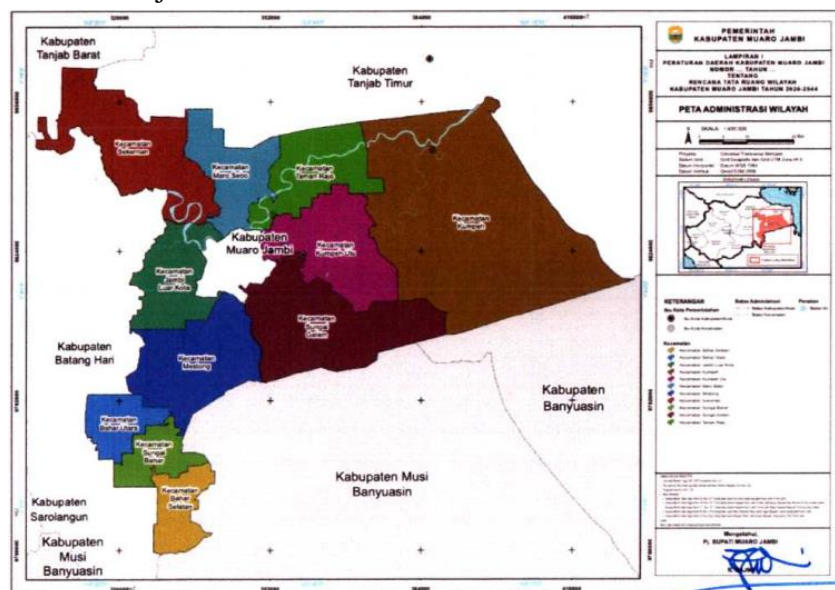


BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Batang Hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999. Pemerintahan kabupaten ini secara resmi mulai beroperasi pada 12 Oktober 1999. Pusat administrasinya berada di Kota Sengeti. Secara geografis, Muaro Jambi berada di kawasan penyangga (hinterland) Kota Jambi, sehingga memiliki posisi strategis sebagai pemasok beragam kebutuhan kota, mulai dari hasil pertanian, perikanan, hingga produk industri dan jasa.⁶⁶



Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Muaro Jambi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025

⁶⁶ "Wilayah Administrasi," pemkab.muarojambikab.go.id, 2019, <https://pembkab.muarojambikab.go.id/wilayah-administrasi>.

Luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi mencapai sekitar $\pm 5.246 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 457,24 ribu jiwa pada akhir tahun 2024.⁶⁷ Secara astronomis, Muaro Jambi berada pada $1^{\circ}51' - 2^{\circ}01'$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}15' - 104^{\circ}30'$ Bujur Timur. Topografi wilayah ini didominasi dataran rendah.⁶⁸ Daerah ini beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan mencapai 186 mm per hari dengan intensitas sekitar 16 hari hujan per bulan. Suhu rata-rata harian berkisar 32°C , dengan perbedaan temperatur yang tidak signifikan antara musim hujan dan kemarau.⁶⁹

Secara administratif, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bagian utara, Provinsi Sumatera Selatan di bagian selatan, Kabupaten Batang Hari di bagian barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bagian timur. Daerah ini terdiri dari 11 kecamatan, 5 kelurahan, dan 150 desa.⁷⁰

Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Jambi Luar Kota	19	1
2	Mestong	14	1
3	Sekernan	15	1
4	Maro Sebo	11	1
5	Kumpeh	16	1
6	Kumpeh Ulu	18	—
7	Sungai Bahar	11	—
8	Sungai Gelam	15	—
9	Taman Rajo	10	—
10	Bahar Utara	11	—
11	Bahar Selatan	10	—
Jumlah		150	5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025

⁶⁷ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan, 2024

⁶⁸ "Wilayah Administrasi," *Op. Cit.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ BPS Kabupaten Muaro Jambi, "Kecamatan Kumpeh Dalam Angka 2024," vol. 25 (Kabupaten Muaro Jambi, 2025).

Proses pemekaran wilayah administratif Kabupaten Muaro Jambi terus berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2010, Kecamatan Sungai Bahar dimekarkan menjadi Kecamatan Bahar Utara dan Bahar Selatan, sementara Kecamatan Maro Sebo melahirkan Kecamatan Taman Rajo. Sejumlah desa baru juga dibentuk untuk menyesuaikan perkembangan wilayah salah satunya adalah Desa Maju Jaya di Kecamatan Kumpeh. Pemekaran ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperluas jangkauan administrasi, dan menyesuaikan kebutuhan pembangunan serta pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah.⁷¹

2.2. Gambaran Umum Kecamatan Kumpeh

2.2.1. Kondisi Geografis Kecamatan Kumpeh

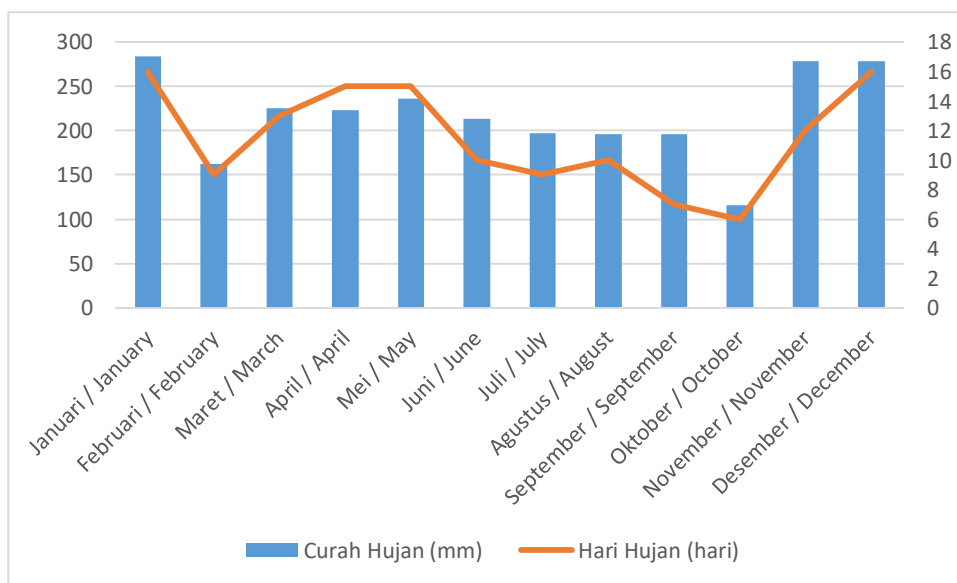
Kecamatan Kumpeh merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Secara administratif, Kumpeh berada pada koordinat sekitar 1°23'–1°58' Lintang Selatan dan 103°15'–103°58' Bujur Timur, dengan luas wilayah ±1.185,32 km². Adapun batas-batas wilayahnya meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Timur di sebelah utara dan timur, Kecamatan Taman Rajo di bagian timur, Provinsi Sumatera Selatan di bagian selatan, serta Kecamatan Kumpeh Ulu di bagian barat.⁷²

Sebagai wilayah dengan bentang lahan datar, sebagian besar masyarakat Kumpeh menggantungkan hidup pada sektor pertanian, dengan komoditas utama berupa padi sawah dan hortikultura seperti cabai. Karakteristik iklimnya bersifat

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

tropis basah, ditandai dengan suhu harian yang relatif hangat—berkisar antara 20°C hingga 35°C—serta curah hujan yang terdistribusi sepanjang tahun. Data curah hujan tahun 2023 menunjukkan bahwa puncak hujan terjadi pada Januari dan Desember dengan curah mencapai 284 mm dan 278 mm, disertai 16 hari hujan per bulan. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi pada Oktober sebesar 116 mm dengan 7 hari hujan.⁷³



Gambar 2.2. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kecamatan Kumpeh Tahun 2023

Sumber: Kecamatan Kumpeh dalam Angka, 2024

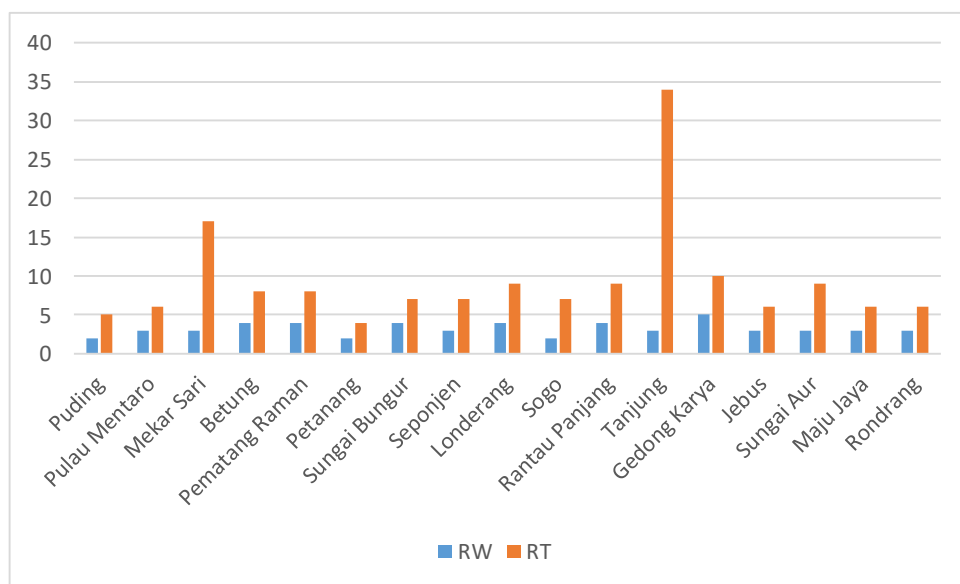
Pola curah hujan yang fluktuatif dan didukung dengan kondisi bahwa Kecamatan Kumpeh merupakan DAS Sungai Batanghari ini berdampak langsung pada aktivitas pertanian, terutama untuk tanaman cabai, karena berpotensi memicu genangan. Data BPBD Muaro Jambi tahun 2024 menunjukkan bahwa Kumpeh merupakan kawasan paling terdampak banjir dibanding kecamatan lain. Tren data BPS 2019–2024 juga memperlihatkan bahwa hampir seluruh desa di Kumpeh

⁷³ *Ibid.*

mengalami banjir setiap tahun. Genangan tahunan ini berdampak langsung pada aktivitas pertanian, termasuk di Desa Maju Jaya dan Mekarsari sebagai sentra produksi cabai, karena tingginya risiko kerusakan tanaman hingga gagal panen.⁷⁴

2.2.2. Kondisi Administratif dan Demografis Kecamatan Kumpeh

Secara administratif, Kecamatan Kumpeh membawahi 16 desa dan 1 kelurahan dengan total 55 dusun dan 158 RT. Wilayah permukiman tersebut meliputi Desa Puding, Pulau Mentaro, Mekar Sari, Betung, Pematang Raman, Petanang, Sungai Bungur, Seponjen, Londerang, Sogo, Rantau Panjang, Gedong Karya, Jebus, Sungai Aur, Rondang, Maju Jaya, serta Kelurahan Tanjung. Kelurahan Tanjung berfungsi sebagai pusat administrasi kecamatan dan berjarak sekitar 110 km dari ibu kota Kabupaten Muaro Jambi.⁷⁵



Gambar 2.3. Grafik Jumlah RT dan RW menurut Desa di Kecamatan Kumpeh Tahun 2022

Sumber: Kecamatan Kumpeh dalam Angka, 2024

⁷⁴ "Data BPBD Kabupaten Muaro Jambi Hingga Saat Ini Sebanyak 2.079 Rumah Terendam Banjir, Op. Cit.

⁷⁵ BPS Kabupaten Muaro Jambi, Op. Cit.

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kecamatan Kumpeh pada tahun 2023 mencapai 43.155 jiwa, yang terdiri dari 22.262 laki-laki dan 20.893 perempuan. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 107 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu terdapat 107 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Dilihat dari tingkat persebaran penduduk, Kecamatan Kumpeh memiliki kepadatan rata-rata 73 jiwa/km² pada tahun 2022. Beberapa desa menunjukkan tingkat kepadatan yang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya, dengan desa terpadat, yaitu Rondrang mencapai 234 jiwa/km². Pola kepadatan ini sekaligus mencerminkan perbedaan intensitas aktivitas sosial dan ekonomi di masing-masing wilayah desa.⁷⁶

2.2.3. Kondisi Sektor Pertanian Kecamatan Kumpeh

Sektor pertanian menjadi basis utama perekonomian masyarakat di Kecamatan Kumpeh, khususnya melalui komoditas hortikultura. Dari berbagai komoditas yang diusahakan, cabai merah merupakan komoditas dengan kontribusi produksi tertinggi, sehingga menempatkan Kumpeh sebagai salah satu sentra cabai utama di Kabupaten Muaro Jambi. Aktivitas budidaya terkonsentrasi di Desa Maju Jaya dan Desa Mekarsari, yang keduanya dikenal sebagai penghasil cabai terbesar di wilayah tersebut. Keunggulan ini dapat terlihat melalui perbandingan produksi antar kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi (Lihat **Tabel 1.2.**).

Meskipun memiliki potensi produksi yang besar, sektor pertanian di Kumpeh menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi stabilitas budidaya cabai. Salah satu tantangan utama adalah kondisi lingkungan yang rentan terhadap

⁷⁶ *Ibid.*

genangan musiman. Sebagai wilayah dataran rendah yang berada di antara dua sungai besar, kejadian banjir tahunan berpengaruh langsung terhadap proses produksi, terutama pada musim penghujan ketika lahan pertanian lebih mudah tergenang. Situasi tersebut dapat menyebabkan kerusakan tanaman, meningkatnya risiko organisme pengganggu tanaman, serta menurunnya produktivitas petani.

Selain aspek lingkungan, permasalahan lain seperti keterbatasan sarana produksi, kualitas infrastruktur pertanian, dan variasi kemampuan teknis petani turut memengaruhi efektivitas usaha tani cabai. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi Kumpeh sebagai kawasan pengembangan cabai perlu didukung oleh implementasi kebijakan yang responsif, terutama dalam penyediaan fasilitas pertanian, pendampingan teknis, dan upaya mitigasi risiko lingkungan untuk menjaga keberlanjutan produksi.

2.2.4. Gambaran Umum Lokus Implementasi (Desa Sentra)

Produksi dan luas panen cabai terbesar di Kecamatan Kumpeh terdapat di Desa Maju Jaya dengan luas panen mencapai 109,99 hektar dan produksi sebesar 1.319,8 ton, serta Desa Mekar Sari dengan luas panen 79,95 hektar dan produksi 959,4 ton. Kedua desa tersebut menjadi sentra utama produksi cabai di Kecamatan Kumpeh karena memiliki lahan yang luas dan produktivitas tinggi.⁷⁷ Perkembangan kedua desa ini juga tidak terlepas dari sejarah pengelolaan lahan pertanian yang sudah berlangsung lama. Desa Mekar Sari merupakan salah satu wilayah yang dahulu berkembang dari program transmigrasi, sedangkan Desa Maju Jaya

⁷⁷ *Ibid.*

merupakan hasil pemekaran dari desa tersebut pada tahun 2009 yang kemudian tumbuh menjadi kawasan dengan aktivitas pertanian yang intensif.⁷⁸

1. Gambaran Umum Desa Mekar Sari

Desa Mekarsari merupakan salah satu desa transmigrasi yang mulai berkembang sejak 1986 dengan nama Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Kumpeh II. Sebagian besar penduduk awal berasal dari Pulau Jawa dan mengawali aktivitas pertanian tanaman pangan seperti jagung. Pada periode awal, desa ini bahkan beberapa kali melaksanakan panen raya yang dihadiri pejabat daerah maupun nasional. Seiring berjalannya waktu, perubahan iklim dan tingginya frekuensi banjir di kawasan dataran rendah Kumpeh menyebabkan tanaman pangan berkali-kali gagal panen. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk mengalihkan sebagian lahan ke komoditas lain seperti kelapa sawit pada lahan rendah dan karet pada lahan yang lebih tinggi. Namun, Mekarsari tetap mempertahankan sebagian luas lahannya untuk budidaya cabai merah, yang kini menjadi salah satu komoditas utama desa.⁷⁹

Desa Mekarsari terbagi ke dalam tiga dusun dengan total 17 RT—Dusun I (RT 01–06), Dusun II (RT 07–11 dan RT 17), serta Dusun III (RT 12–16). Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1.798 hektare. Secara geografis, Mekarsari berbatasan dengan PT Makin Group di utara, Desa Pulau Mentaro di selatan, Desa Betung di timur, dan Desa Teluk Raya di barat, dengan pusat pemerintahan berlokasi di RT 07 Dusun II pada koordinat -1.518596, 103.872421.⁸⁰ Jumlah

⁷⁸ Sistem Informasi Desa Maju Jaya Kecamatan Kumpeh

⁷⁹ Pemerintah Desa Mekar Sari, “*Website Resmi Desa Mekar Sari*,” accessed November 19, 2025, <https://mekarsari-kumpeh.desa.id/data-wilayah>.

⁸⁰ *Ibid.*

penduduk Desa Mekarsari mencapai 2.553 jiwa atau 702 kepala keluarga. Sebagai desa transmigrasi, komposisi sosial masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh sejarah pemukiman awal. Kondisi lahan yang berupa dataran rendah dan dipengaruhi siklus kemarau, pancaroba, dan penghujan berdampak langsung pada pola aktivitas pertanian masyarakat setempat.⁸¹

2. Gambaran Umum Desa Maju Jaya

Desa Maju Jaya merupakan desa dengan wilayah terkecil di Kecamatan Kumpeh, yaitu seluas 446 km². Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Mekar Sari pada tahun 2009. Sebelum pemekaran tersebut, wilayah yang kini menjadi Desa Maju Jaya merupakan bagian dari Desa Mekar Sari, yang sebelumnya berstatus sebagai UPT Kumpeh II. Secara historis, penduduk Desa Maju Jaya didominasi oleh masyarakat transmigran yang berasal dari Pulau Jawa. Latar belakang tersebut memengaruhi pola kehidupan dan mata pencaharian penduduk, termasuk dalam sektor pertanian. Sejak awal permukimannya, masyarakat sudah terbiasa menanam komoditas hortikultura, terutama cabai, yang hingga kini tetap menjadi salah satu komoditas unggulan desa.⁸²

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Desa Maju Jaya tercatat sebanyak 420 jiwa yang tersebar di dua dusun. Dusun I memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 246 jiwa dengan 81 KK. Di dalamnya terdapat tiga RT: RT 001 berjumlah 106 jiwa, RT 002 berjumlah 75 jiwa, dan RT 003 berjumlah 65 jiwa. Sementara itu, Dusun II dihuni oleh 174 jiwa dengan 59 KK, yang juga terbagi ke

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Pemerintah Desa Maju Jaya, "Website Resmi Desa Maju Jaya," accessed November 19, 2025, <https://www.majujaya.desa.id/>.

dalam tiga RT: RT 004 berjumlah 60 jiwa, RT 005 berjumlah 58 jiwa, dan RT 006 berjumlah 56 jiwa. Penyebaran penduduk yang relatif merata di setiap RT ini menunjukkan struktur permukiman yang terorganisasi dengan baik serta mencerminkan dinamika sosial masyarakat Desa Maju Jaya.⁸³

2.3. Gambaran Umum Proses Produksi Komoditas Cabai

2.3.1. Gambaran Umum Proses Produksi

Tingginya nilai ekonomi cabai menjadikannya sebagai komoditas strategis, sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam upaya meningkatkan produktivitas dan memastikan keuntungan bagi petani.⁸⁴ Dalam bidang pertanian, proses produksi dipahami sebagai rangkaian tahapan yang dilakukan untuk mengubah input, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi, menjadi output berupa hasil pertanian.⁸⁵ Proses produksi tanaman pada umumnya mengacu pada petunjuk teknis budidaya yang bertujuan menghasilkan panen dalam jumlah optimal dan berkualitas.⁸⁶ Secara umum, teknik budidaya mencakup tahapan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga pemanenan.⁸⁷ Adapun tahapan budidaya cabai merah diuraikan sebagai berikut.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Aylee Ch. A. Sheyoputri, Andi Muhibuddin, and Apiaty Kamaluddin, *Manajemen Produksi Pertanian* (Bengkulu: Qianzy Sains Indonesia, 2025), hlm 79.

⁸⁵ Nindy Sevirasari, Cahyo Adileksana, and Ananta Bayu Pratama, *Modul Pembelajaran Praktik Pertanian Terbaik Budi Daya Cabai Merah* (Jakarta Selatan: Yayasan Edufarmers International, 2023), hlm 2.

⁸⁶ Food and Agriculture Organization of the United Nations, *Budidaya Cabai Yang Baik Dan Benar (Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan, Dan Pemanenan Tanaman Cabai)*, 1st ed. (FAO Indonesia, 2013), <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/be829id>, hlm 1.

⁸⁷ Sheyoputri, et al., *Op. Cit.*, hlm 35.

1. Persiapan Lahan

Tahapan ini meliputi pembersihan lahan dari gulma dan sisa tanaman sebelumnya, untuk memperbaiki struktur tanah.⁸⁸

2. Persiapan Benih

Tahap persiapan benih meliputi pemilihan benih yang bermutu dan pemberian zat tertentu sebelum disemai untuk meningkatkan kualitas bibit.⁸⁹

3. Penyemaian

Penanaman benih cabai dapat dilakukan secara langsung di lubang tanam atau melalui tahap penyemaian terlebih dahulu. Penanaman langsung umumnya memiliki risiko kegagalan tumbuh yang lebih tinggi dibandingkan metode penyemaian.⁹⁰

4. Penanaman

Penanaman merupakan kegiatan memindahkan bibit ke media tanam yang telah disiapkan. Bibit cabai merah umumnya siap dipindahkan ke lahan pada usia 21–28 hari setelah semai.⁹¹

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman, sehingga diperoleh hasil produksi yang maksimal dan berkualitas.⁹²

⁸⁸ Dinata et al., *Op. Cit.*, hlm 9-10.

⁸⁹ Sevirasari, et al., *Op. Cit.*, hlm 48-57.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

a. Penyiraman dan Pengairan

Sumber air dapat berasal dari sumur atau sistem irigasi teknis, disesuaikan dengan kondisi agroklimat setempat.⁹³

b. Pemupukan

Pemupukan merupakan aspek penting dalam pemeliharaan tanaman untuk memenuhi kebutuhan unsur hara. Jenis pupuk yang digunakan antara lain: Pupuk Organik, seperti kompos, pupuk kandang, dan biofertilizer; Pupuk Anorganik; dan Pupuk NPK.⁹⁴

c. Pengendalian Hama dan Penyakit.

Hama dan penyakit berpotensi menurunkan hasil dan kualitas produksi cabai. Upaya pengendalian dapat dilakukan melalui: Penggunaan pestisida sesuai dengan jenis organisme pengganggu; Pengendalian alami, misalnya melalui biological control; atau Pemanfaatan drone untuk pemantauan, yang memungkinkan deteksi dini serangan hama dan penyakit.⁹⁵

d. Pemangkasan

Pada tanaman cabai, pemangkasan juga bertujuan mengurangi daun yang menghambat pertumbuhan bagian tanaman lainnya.⁹⁶

e. Rotasi Tanaman

Rotasi tanaman merupakan praktik pergantian jenis tanaman pada lahan yang sama di musim tanam berikutnya untuk menjaga keseimbangan

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Sheyoputri, et al., *Op. Cit.*, hlm 102-106.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

unsur hara tanah, menekan risiko serangan hama dan penyakit, serta meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang.⁹⁷

7) Panen

Panen cabai merah dilakukan saat buah mengalami perubahan warna dari hijau menjadi merah dengan tingkat kematangan sekitar 80 persen. Waktu panen yang ideal adalah pada pagi hari setelah embun mengering agar buah tidak mudah busuk. Menjelang masa panen, penyemprotan pestisida harus dihentikan paling lambat satu minggu sebelum panen.⁹⁸

2.3.2. Regulasi Pendukung Proses Produksi Komoditas Cabai

Pada tingkat nasional, regulasi yang menjadi landasan pendukung proses produksi pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Pemerintah di Lingkup Kementerian Pertanian. Regulasi ini menegaskan bahwa bantuan pemerintah dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis. Program bantuan tersebut meliputi: (1) ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; (2) peningkatan nilai tambah dan daya saing industri; (3) pendidikan dan pelatihan vokasi; (4) dukungan manajemen; serta (5) riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam regulasi tersebut, komoditas hortikultura, termasuk cabai, menjadi salah satu sasaran utama penerima bantuan pemerintah. Secara khusus, dukungan terhadap komoditas cabai diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

⁹⁷ *Ibid.*

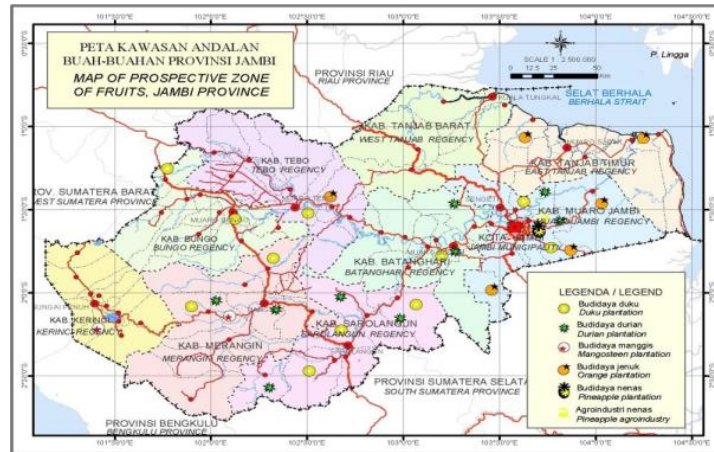
⁹⁸ Sevirasari, et al., *Op. Cit.*, hlm 66-67.

- 1) Fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan aneka cabai
- 2) Fasilitasi bantuan benih hortikultura
- 3) Fasilitasi prasarana perbenihan hortikultura
- 4) Fasilitasi gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) hortikultura
- 5) Fasilitasi penanganan dampak perubahan iklim pada subsektor hortikultura.

Selain bantuan yang bersifat spesifik komoditas, cabai juga memperoleh dukungan dari program pertanian secara umum yang berlaku lintas komoditas. Dukungan tersebut meliputi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, baik melalui konstruksi irigasi perpipaan maupun pompanisasi, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), penyediaan pupuk organik dan rumah kompos, serta sarana penunjang produksi lainnya.

Pada tingkat daerah, kerangka pengembangan potensi pertanian diterjemahkan dalam kebijakan penataan ruang provinsi. Di Provinsi Jambi, penetapan kawasan peruntukan pertanian telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2013–2033. Dokumen ini menetapkan empat jenis kawasan pertanian, yaitu kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Pembagian ini menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa arah pembangunan pertanian di daerah selaras dengan potensi ruang dan karakteristik wilayah. Pengembangan kawasan Hortikultura di Provinsi

Jambi terdapat di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Sungai Penuh.⁹⁹



Gambar 2.4. Peta Pembagian Wilayah Kawasan Tanaman Hortikultura
Sumber: Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Peternakan Provinsi Jambi 2021-2026

Khusus di Kabupaten Muaro Jambi, komoditas cabai menjadi salah satu fokus pengembangan hortikultura karena memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Sentra produksinya terkonsentrasi di Desa Maju Jaya dan Desa Mekarsari di Kecamatan Kumpeh, yang dikenal sebagai wilayah dengan produktivitas cabai tertinggi di Muaro Jambi. Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi (2020) menunjukkan bahwa Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu dari sebelas kabupaten di Provinsi Jambi yang aktif mengembangkan tanaman padi dan hortikultura, dengan Kecamatan Kumpeh menempati posisi paling unggul dalam produksi cabai.¹⁰⁰

Arah kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Muaro Jambi pada dasarnya dirumuskan sejalan dengan kebijakan di tingkat nasional dan provinsi.

⁹⁹ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi. *Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi 2021-2026*, hlm 148.

¹⁰⁰ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi. *Laporan Statistik Pertanian Tahun 2020*, hlm. 32.

Keselarasan tersebut tercermin dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021–2026. Dalam dokumen perencanaan tersebut, ditetapkan arah kebijakan utama yang meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian;
2. penerapan praktik budidaya pertanian yang ramah lingkungan;
3. penataan serta penetapan kawasan sektor produksi unggulan;
4. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian; dan
5. pembinaan kelembagaan kelompok petani.

Arah kebijakan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kemudian diuraikan kembali dalam suatu kegiatan. Adapun pemilihan kegiatan dalam setiap program prioritas tersebut didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 2.2. Indiaktor Program Urusan Pertanian di Kabupaten Muaro Jambi

Nomenklatur Urusan Kabupaten	Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya pelayanan publik yang optimal
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian OPT dan DPI terhadap luas tanam
Program Penyuluhan Pertanian	Terbinanya kelembagaan (kelompok) petani

Sumber: Renstra DTPH Muaro Jambi 2025-2029

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, sementara pengembangan prasarana

pertanian berfokus pada ketersediaan infrastruktur pendukung serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Di sisi lain, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian bertujuan untuk meminimalkan dampak organisme pengganggu tanaman dan bencana terhadap luas tanam. Adapun program penyuluhan pertanian berperan dalam membina dan meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani sebagai aktor utama dalam kegiatan produksi. Secara keseluruhan, rangkaian program tersebut menjadi kerangka kebijakan daerah yang mendasari pengelolaan komoditas pertanian, termasuk komoditas cabai, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada peran dan keterkaitan antaraktor dalam pelaksanaannya di tingkat lokal.

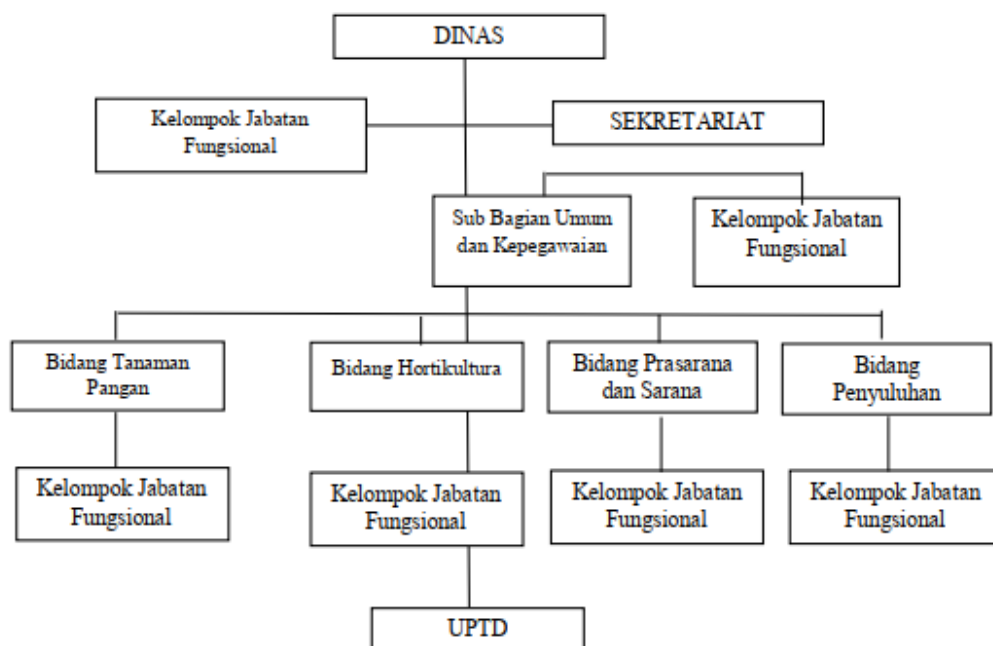
Selanjutnya, kinerja pada program tersebut selaras dengan komitmen DTPH menguraikan arah kebijakan yang ketiga, yaitu penataan serta penetapan kawasan sektor produksi unggulan. Dalam hal ini, pengelolaan kawasan sentra produksi pertanian dilakukan dalam rangka penguatan ekonomi lokal melalui:

1. Penyediaan sarana produksi pertanian benih unggul bermutu, pupuk, dan obat-obatan pertanian;
2. Rehabilitasi/pembangunan jaringan irigasi tersier;
3. Pemanfaatan sumber-sumber pengairan, seperti embung, dan parit;
4. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna;
5. Intensifikasi dan diversifikasi tanaman pertanian; serta
6. Penanggulangan organisme pengganggu tanaman secara intensif dan terpadu.

2.4. Gambaran Umum Aktor dalam Proses Produksi Komoditas Cabai

2.4.1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Kabupaten Muaro Jambi merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Kedudukan, struktur organisasi, serta tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 47 Tahun 2016, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Secara struktural, dinas ini berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab langsung dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pembinaan teknis sektor tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.



Gambar 2.5. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi

Sumber: Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025-2029

DTPH Kabupaten Muaro Jambi memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada bidang tanaman pangan dan hortikultura. Tugas ini dijalankan melalui rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan pertanian, termasuk pembinaan kelompok tani dan peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah. Kemudian, dalam menjalankan tugas tersebut, DTPH memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, serta penyuluhan pertanian.
- 2) Penyusunan program penyuluhan untuk mendukung peningkatan kapasitas petani.
- 3) Pengembangan prasarana pertanian, termasuk sarana irigasi, alat dan mesin pertanian, serta sarana produksi lainnya.
- 4) Pengawasan mutu dan peredaran benih, serta pengendalian penyediaannya.
- 5) Pengawasan penggunaan sarana produksi pertanian, termasuk pupuk dan pestisida.
- 6) Pembinaan produksi tanaman pangan dan hortikultura, baik dari aspek budidaya maupun pascapanen.
- 7) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) serta penanggulangan hama dan penyakit.
- 8) Penanggulangan dampak bencana alam terhadap usaha tani.
- 9) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk.

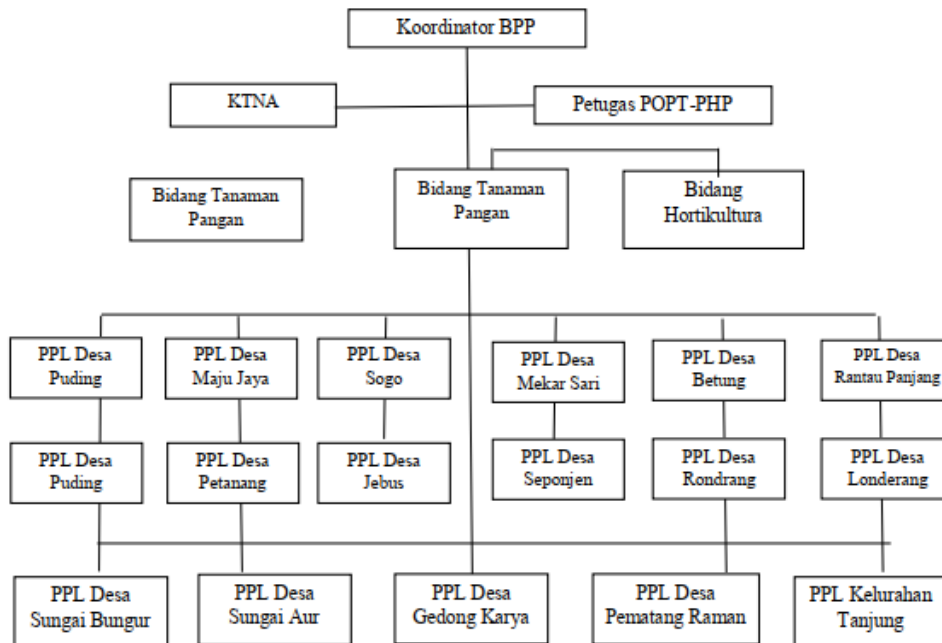
- 10) Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pemberian rekomendasi teknis kepada petani.
- 11) Pemantauan dan evaluasi program pertanian di wilayah kabupaten.
- 12) Pelaksanaan administrasi dinas serta dukungan penyelenggaraan reformasi birokrasi.
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan kewenangan.

2.4.2. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kumpeh

Balai Penyuluh Pertanian (BPP) merupakan lembaga teknis di tingkat kecamatan yang menjadi pusat koordinasi antara penyuluh, petani, dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan. BPP berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan komunitas petani, sehingga menjadi aktor penting dalam penerjemahan kebijakan pertanian ke tingkat operasional, termasuk kebijakan pengembangan komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh.¹⁰¹ Penyuluh pertanian sendiri merupakan pelaksana teknis yang bertugas memberikan pendampingan, penyebaran teknologi, serta fasilitasi akses petani terhadap program pemerintah. Penyuluh Pertanian ASN dapat berasal dari PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.¹⁰²

¹⁰¹ Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.*

¹⁰² Bupati Muaro Jambi Provinsi Jambi. *Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi*



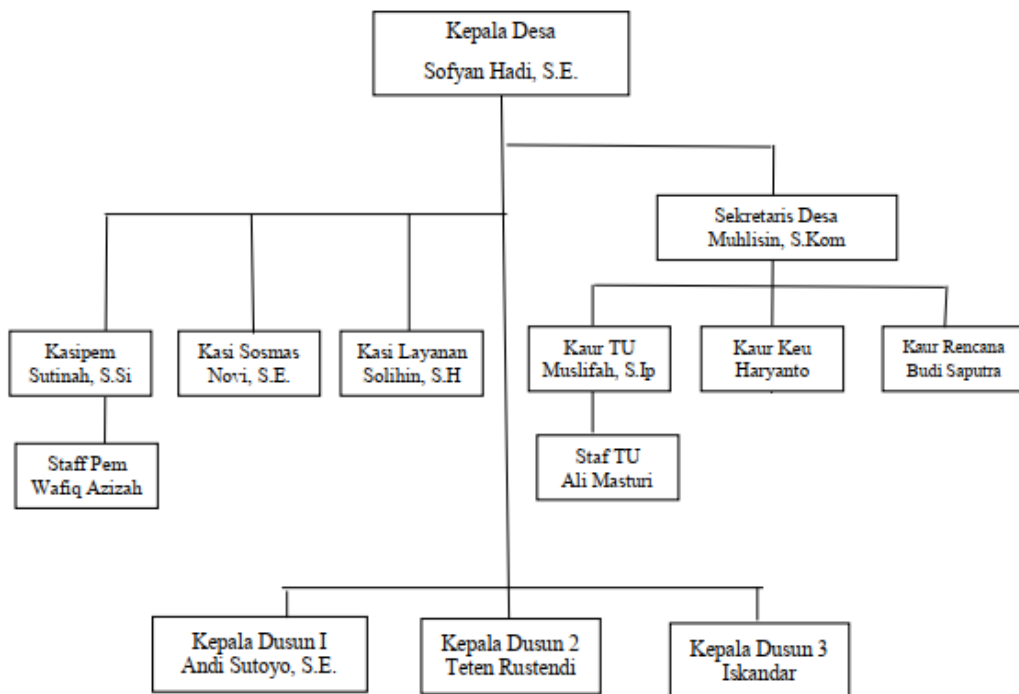
Gambar 2.6. Struktur Organisasi BPP Kecamatan Kumpeh
Sumber: Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kumpeh, 2024

Dalam penelitian ini, BPP Kumpeh dengan coordinator Pak Zaenal, menjadi unit terdepan yang memastikan implementasi kebijakan hortikultura berjalan efektif. Penyuluh berperan dalam memberikan bimbingan teknis, memonitor kegiatan kelompok tani, serta mengoordinasikan program bantuan. Dengan demikian, kapasitas penyuluh dan kinerja BPP menjadi elemen krusial dalam menilai sejauh mana implementasi program pengembangan cabai dapat berjalan di Desa Mekar Sari dan Desa Maju Jaya sesuai ketentuan.

2.4.3. Pemerintah Desa Mekar Sari dan Desa Maju Jaya

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa lokal, hak asal-usul, dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dalam pembangunan pertanian,

pemerintah desa memegang peran yang strategis karena menjadi aktor terdekat dengan masyarakat dan memiliki kewenangan penuh dalam mengelola program di tingkat lokal.¹⁰³ Secara sosiologis, Pemerintah desa dapat berperan sebagai regulator yang mengatur arah kebijakan, sebagai fasilitator dan mediator yang mempertemukan kebutuhan petani dengan berbagai pihak, serta sebagai katalisator dan dinamisator dalam menggerakkan kegiatan pembangunan pertanian.¹⁰⁴



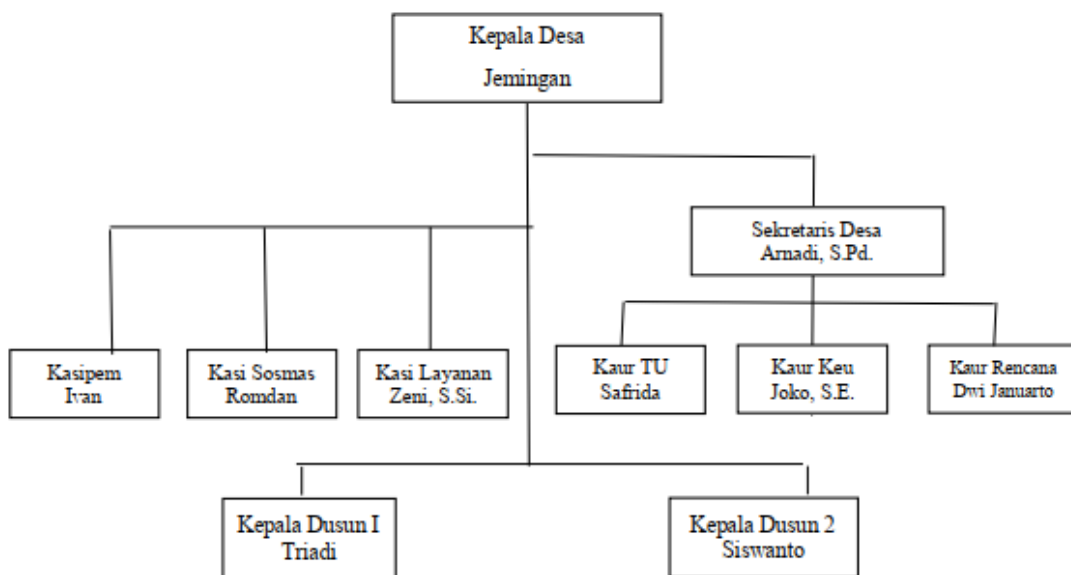
Gambar 2.7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mekarsari
Sumber: Pemerintah Desa Mekar Sari, 2025

Sebagai bagian dari lokus penelitian, Desa Mekarsari memiliki peran penting dalam implementasi pengembangan komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh. Untuk memahami bagaimana peran pemerintah desa dijalankan, diperlukan

¹⁰³ Hertiani Simanjuntak, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara)" (Universitas Medan Area, 2024).

¹⁰⁴ Kliwon Hidayat, Yayuk Yuliati, and Witono, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Pertanian Di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Bojonegoro" 26, no. 2 (2024): 1222–32.

penjelasan mengenai struktur organisasinya. Struktur organisasi desa menunjukkan pembagian tugas perangkat desa, alur koordinasi, serta posisi-posisi strategis yang berpengaruh terhadap pelayanan pemerintahan, termasuk dalam mendukung kegiatan pertanian dan fasilitasi kelompok tani. Penyajian struktur organisasi ini membantu memberikan gambaran mengenai kapasitas kelembagaan desa sebagai aktor pelaksana di tingkat lokal.



Gambar 2.8. Struktur Desa Maju Jaya

Sumber: Pemerintah Desa Maju Jaya, 2025

Selain Desa Mekarsari, Desa Maju Jaya juga merupakan sentra produksi cabai sekaligus lokus implementasi kebijakan pengembangan hortikultura. Meskipun berada dalam kecamatan yang sama, kedua desa ini memiliki karakteristik kelembagaan dan pembagian tugas yang mungkin berbeda, sehingga penting untuk menggambarkan struktur organisasi pemerintah desa secara terpisah. Penyajian struktur organisasi Desa Maju Jaya memberikan pemahaman mengenai bagaimana koordinasi pemerintahan desa berlangsung dan sejauh mana kapasitas kelembagaan desa dapat mendukung implementasi kebijakan pertanian.

2.4.4. Organisasi Petani Desa Mekar Sari dan Desa Maju Jaya

Aktor penting selanjutnya adalah kelembagaan petani yang dibangun dari, oleh, dan untuk petani sebagai wadah yang memperjuangkan kepentingan mereka. Bentuk kelembagaan ini meliputi kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), asosiasi komoditas pertanian, hingga dewan komoditas nasional. Keberadaan kelembagaan ini menjadi fondasi penting bagi penguatan usaha tani, karena di dalamnya disusun instrumen perencanaan seperti Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang wajib disusun sebagai dasar pengelolaan usaha pertanian.¹⁰⁵ Melalui kelembagaan yang terstruktur dan berfungsi, petani memiliki ruang belajar, berkoordinasi, dan mengembangkan usaha secara lebih terarah, termasuk dalam pengelolaan komoditas cabai di Desa Mekarsari dan Maju Jaya.

Tabel 2.3. Data Kelompok Tani Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh

Nama Kelompok Tani	Tahun Berdiri	Jumlah Anggota	Komoditas yang Diusahakan
Sederhana	2000	45	Padi dan Jagung
Citra Usaha	2000	30	Sayuran
Margo Santoso	2000	42	Padi dan Jagung
Podo Makmur	2000	35	Padi dan Jagung
Karya Bakti	2000	18	Sayuran
Karya Maju	2000	41	Sayuran
Tunas Karya	2000	33	Sayuran
Sedia Maju	2000	29	Padi dan Jagung
Jumlah		272	

Sumber: Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kumpeh, 2020

Berdasarkan data kelompok tani Desa Maju Jaya, terdapat delapan kelompok tani aktif dengan total 272 anggota yang seluruhnya berdiri sejak tahun 2000.

¹⁰⁵ Kementerian Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Keloembagaan Petani.*

Secara umum, komoditas yang diusahakan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu padi–jagung dan sayuran, di mana kategori sayuran tersebut juga mencakup komoditas cabai yang menjadi tanaman utama masyarakat. Dengan demikian, meskipun tabel hanya menyebutkan “sayuran”, pada praktiknya sebagian besar anggota kelompok tani mengembangkan budidaya cabai baik sebagai komoditas utama maupun tanaman sela.¹⁰⁶

Tabel 2.4. Data Kelompok Tani Desa Maju Jaya Kecamatan Kumpeh

Nama Kelompok Tani	Tahun Berdiri	Jumlah Anggota	Komoditas yang Diusahakan
Sri Rezeki	1986	19	Cabe dan Kelapa Sawit
Sumber Hidup II	1986	16	Cabe dan Kelapa Sawit
Sido Dadi	1986	18	Cabe dan Kelapa Sawit
Sumber Rezeki	1986	21	Cabe dan Kelapa Sawit
Sumber Hidup V	1986	18	Cabe dan Kelapa Sawit
Usaha Abadi	2000	20	Sayuran
Pemuda Tani Karya Jaya	2019	21	Cabe
KWT Mayang	2014	15	Sayuran
Jumlah		107	

Sumber: Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kumpeh, 2020

Berdasarkan data Kelompok Tani Desa Maju Jaya yang tercatat pada Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kumpeh tahun 2020, terdapat enam kelompok tani aktif dengan total 107 anggota. Sebagian besar kelompok tani—seperti Sri Rezeki, Sumber Hidup II, Sido Dadi, Sumber Rezeki, dan Sumber Hidup V—fokus pada komoditas cabai dan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa cabai telah menjadi komoditas yang diusahakan masyarakat sejak lama, bahkan sebelum pemekaran desa. Sementara itu, Kelompok Wanita Tani (KWT) Mayang yang berdiri pada

¹⁰⁶ Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kumpeh, “*Laporan Pertanian Kumpeh 2020*” (Kabupaten Muaro Jambi, 2020).

tahun 2014 berfokus pada komoditas sayuran, yang di dalam praktiknya juga mencakup budidaya cabai skala rumah tangga.¹⁰⁷

2.4.5. Lembaga Pendukung Strategis

Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral yang memiliki mandat menjaga stabilitas makroekonomi, terutama stabilitas harga. Pada urusan pengendalian inflasi, BI memberi perhatian khusus pada komoditas *volatile food*, yaitu kelompok pangan yang harganya sangat mudah bergejolak dan memberi kontribusi signifikan terhadap inflasi. Meskipun tanaman cabai tergolong komoditas hortikultura, tetap masuk dalam kategori *volatile food* yang dipantau ketat oleh BI karena sensitivitasnya terhadap cuaca, pasokan, distribusi, dan permintaan musiman.¹⁰⁸

Dalam upaya menjaga stabilitas harga *volatile food*, termasuk cabai, BI menjalankan peran strategis melalui koordinasi kebijakan lintas sektor dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). TPIN–TPID mengoperasikan empat pilar pengendalian inflasi:

- (1) keterjangkauan harga,
- (2) ketersediaan pasokan,
- (3) kelancaran distribusi, dan
- (4) komunikasi efektif.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kumpeh, *Op. Cit.*

¹⁰⁸ Departemen Komunikasi Bank Indonesia, “Pemerintah Dan Bank Indonesia Memperkuat Sinergi Guna Menjaga Inflasi 2025,” *bi.go.id*, 2025, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_272125.aspx.

¹⁰⁹ Presiden Republik Indonesia. *Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN)*.

Sejak 2022, penguatan keempat pilar tersebut dikonsolidasikan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Melalui GNPIP, BI mendorong peningkatan produktivitas komoditas prioritas, efisiensi distribusi antardaerah, dan stabilisasi harga melalui intervensi terintegrasi. Walaupun GNPIP berfokus pada pangan, beberapa komoditas hortikultura strategis—termasuk cabai—tetap menjadi sasaran intervensi karena perannya sebagai pendukung inflasi *volatile food*.¹¹⁰

Pada level daerah, kontribusi BI ditunjukkan melalui dukungan langsung kepada kelompok tani, terutama dalam penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Berdasarkan observasi awal penelitian di Desa Maju Jaya dan Desa Mekarsari, BI memberikan bantuan berupa *drone sprayer* yang disalurkan langsung kepada petani. Penyaluran yang langsung dan cepat ini dinilai lebih efektif oleh petani dibandingkan beberapa bantuan pemerintah daerah yang dianggap masih terbatas dalam menjawab kebutuhan budidaya cabai.

Dalam penelitian ini, BI dikategorikan sebagai lembaga pendukung strategis yang berperan penting dalam memperkuat implementasi pengembangan komoditas hortikultura cabai di Kecamatan Kumpeh. Melalui TPIP–TPID, GNPIP, serta dukungan berupa alat-alat mesin pertanian (alsintan), BI ikut mendorong peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga — seluruhnya menjadi faktor pendukung penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan kawasan hortikultura.

¹¹⁰ “Pemerintah Dan Bank Indonesia Memperkuat Sinergi Guna Menjaga Inflasi 2025,” *Op.Cit.*